OMBUDSMAN TANTANG DKI-KAI BUKTIKAN TIADA KLAIM ASET DI TANAH ABANG

Rabu, 14 November 2018 - Balgis

Ombudsman DKI Jakarta menyebut PD Sarana Jaya dan Pemprov DKI saling klaim aset Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Namun keduanya sama-sama membantah.

tirto.id - Pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (*skybridge*) Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak berjalan mulus. Sempat tersiar kabar saling klaim aset Jalan Jatibaru Raya-yang letaknya persis di depan Stasiun Tanah Abang-antara PT Kereta Api Indonesia dan Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masalah semacam ini tak perlu mencuat seandainya masing-masing pihak menanggalkan ego instansi masing-masing.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMN itu konsumennya sama, yaitu rakyat Indonesia. Untuk kebutuhan administrasi dibagi-bagi tugasnya, tapi jangan dibikin kompartemen," kata Anies, Selasa (13/11/2018) kemarin.

Kabar saling klaim muncul dari mulut Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho. Menurutnya, PT KAI mengklaim tanah 18 meter dari Stasiun Tanah Abang milik KAI berdasarkan hukum Belanda. Sementara Pemprov DKI berpedoman pada aturan pertanahan yang baru.

Selain menemukan sengketa aset, Ombudsman Jakarta juga menyebutkan empat poin lain yang harus diselesaikan KAI dan Pemprov DKI. Keempat hal itu ialah alur penumpang dari Stasiun Tanah Abang ke *skybridge*, sarana prasarana pada *skybridge*, jumlah gerbang masuk, serta masalah keamanan.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan bahkan mengaku tidak pernah mendengar masalah ini. Yoory mengklaim Sarana Jaya selalu melibatkan PT KAI sedari awal perencanaan pembangunan *skybridge*.

"Saya berhubungan langsung dengan PT KAI dan enggak ada itu konflik. Kami sudah duduk bersama dan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya para penumpang kereta," kata Yoory kepada reporter *Tirto* di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/11/2018) siang.

Meski mengaku tak saling klaim aset, Yoory mengatakan PT KAI memang meminta sejumlah hal kepada pemerintah. Permintaan itu di antaranya pembangunan toilet, akses langsung dari *skybridge* ke stasiun, dan keberadaan petugas keamanan. Namun karena permintaan disampaikan di tengah pembangunan, hal tersebut tak bisa langsung terealisasi.

"Kalau memang itu memungkinkan untuk dilakukan, akan kami lakukan. Tapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Tambahan itu sangat mungkin untuk bisa dibicarakan bersama-sama," ujar Yoory.

Yoory mengimbau media tidak memberitakan temuan Ombudsman DKI terus-menerus. Ia menyebutkan Sarana Jaya saat ini fokus mengerjakan *skybridge* yang ditargetkan selesai pada 23 November 2018.

Senior Manager Humas PT KAI Daop 1, Edy Kuswoyo, juga membantah pernyataan Ombudsman Jakarta. Menurut Edy, PT KAI dan Sarana Jaya tidak pernah membicarakan apa pun terkait aset.

"Enggak benar itu soal klaim, enggak ada sengketa. Pada prinsipnya PT KAI menyambut baik dan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ungkap Edy kepada reporter *Tirto*.

Kami mengonfirmasi ulang pernyataan kedua belah pihak kepada Teguh Nugroho. Ia kemudian mengatakan apabila dari masing-masing pihak memang membantah soal sengketa, itu pertanda baik.

"Syukur, dong, kalau enggak ada masalah," jelas Teguh kepada reporter *Tirto*.

Guna memastikan klaim tersebut, Teguh akan mengelar rapat yang menghadirkan instansi terkait pada Jumat (16/11/2018) nanti.

"Coba nanti kita lihat apakah mereka masing-masing sudah punya bahan untuk lima isu itu," pungkas Teguh.

(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Damianus Andreas, Penulis: Damianus Andrea, Editor: Rio Apinino